

KPK Pastikan Belum Hentikan Kasus Korupsi RJ Lino

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan, pihaknya belum menghentikan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino).

Meskipun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebut KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Untuk SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) di situ memang dua tahun, tapi di situ kan dapat dihentikan. Ini kami belum sampai

kesimpulan akan penghentian," kata Marwata, Rabu (3/3).

Sebagaimana diketahui, penyidikan kasus ini terkendala perhitungan kerugian keuangan negara. Sementara, RJ Lino telah menyandang status tersangka sejak akhir 2015 atau lebih dari lima tahun lalu.

RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbuatannya merugikan keuangan negara.

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II. • han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KUNJUNGAN MENTERI AGAMA KE KPK
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) berjalan keluar se usai melakukan pertemuan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/3). Pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut terkait dengan program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Adu Domba AHY dengan Ibas Merupakan Pengalihan Isu

JAKARTA (IM) - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malalaring mengemukakan, upaya adu domba antara ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) adalah upaya pengalihan isu.

Menurut Andi, upaya itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat mengenai siapa sebenarnya di balik gerakan pengambilalihan atau kudeta internal partai.

"Itu mengalihkan perhatian seakan akan mengadu domba adik (Ibas) dan kakak (AHY)." ujar Andi dalam diskusi virtual bertajuk Faksionalisasi Partai Politik Menjelang Tahun Politik 2024, Rabu (3/3). Andi mengatakan, Ibas sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sudah menyatakan mendukung kepemimpinan AHY.

"Mas Ibas kan sudah membantah, dan mengatakan loyal pada AHY," tegas Andi.

Andi juga mengemukakan anggapan bahwa dugaan kudeta di Partai Demokrat hanya isu yang dilemparkan untuk meningkatkan elektabilitas Partai

Demokrat. Ia menyebut upaya kudeta itu memang terjadi. Sikap Partai Demokrat membuka isu tersebut agar publik menilai sendiri mengenai apa yang terjadi di internal partai.

"Kalau sekarang Demokrat dapat simpati publik ya kita bersyukur. Tapi kita tidak mendesani, kalau bisa ya lebih baik tidak ada masalah ini," katanya.

Nama Ibas sempat disebut oleh salah satu kader sayap Partai Demokrat yang mendukung adanya kongres luar biasa (KLB), yakni Kader Muda Demokrat (KMD). Dalam konferensi pers Kamis (25/2), organisasi sayap ini mengusulkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal pada KLB yang rencananya dilaksanakan pada Maret ini.

"Saya ingin menegaskan beberapa hal. Pertama jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan," ujar Jokowi di pantau dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

"Karena itu yang dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh

Jokowi Minta Pemda Dalam Penanganan Bencana Alam Tak Hanya Sibuk Buat Aturan

Presiden Jokowi mengingatkan, dalam menangani bencana tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya harus terintegrasi, dan saling mengisi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah dalam penanganan bencana jangan hanya sibuk menyusun aturan saja, sementara yang utama dalam penanganan dampak dari bencana itu malah terlupakan.

Penegasan ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Rabu (3/2).

"Saya ingin menegaskan beberapa hal. Pertama jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan," ujar Jokowi di pantau dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Kedua, pemda diminta

merumuskan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana.

"Harus benar-benar terintegrasi. Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir betul-betul dilihat betul," tutur Kepala Negara.

"Tidak ada, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi. Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup," katanya.

Sehingga, tidak boleh ada pihak yang merasa kalau satu atau dua hal bukan merupakan tugasnya. Jokowi menegaskan, pemikiran seperti itu tidak boleh menjadi kebiasaan.

"Hati-hati ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketiga, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi harus cepat dilakukan pemda. Jokowi mengingatkan bahwa kecepatan yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan

rekonstruksi. "Jangan sudah lebih dari satu tahun belum muncul apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan," ungkapnya.

Keempat, pemda harus memastikan sistem peringatan dini bencana berfungsi dengan baik. Sehingga dapat bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Menurut Jokowi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. "Terakhir, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebenaran harus terus menerus ditingkatkan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga," kata Jokowi.

Ingin Diterima Jadi WNI, 2 WNA Serius Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

DENPASAR (IM) - Dua warga negara asing (WNA) di Bali, terlihat sangat serius menyanyikan lagu Indonesia Raya di kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali. Keduanya dapat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia itu dengan baik.

Keduanya, Troy Sinclair yang memiliki dua kewarganegaraan Australia dan Inggris serta Marlon Gerber dari Swiss, saat ini tengah berusaha agar bisa diterima sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Mengatakan kemeja khas Bali endek warna biru, Sinclair mengambil sikap berdiri tegak. Dengan intonas yang bersemangat, bule berkepala pelontos ini lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meski lirik lagunya tak sempurna betul, namun dia berhasil menyanyikannya hingga akhir.

Sedangkan Gerber memilih bernyanyi sambil duduk di kursi. Bule yang mengenakan baju endek merah ini terlihat serius mengingat setiap lirik yang dinyanyikan sampai selesai.

Kepala Kantor Wilayah

Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk yang menjadi ketua tim verifikasi mengatakan, lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan salah satu materi yang diberikan.

"Ada juga materi tentang kewarganegaraan," katanya, Rabu (3/3).

Jamaruli menjelaskan, Sinclair telah berada di Indonesia sejak 2003/2004 dan saat ini tinggal di Desa Klumpu, Nusa Penida, Klungkung. Dia memiliki usaha di sektor pariwisata di Nusa Lembangan.

Sedangkan Gerber mempunyai seorang ibu yang berasal dari Indonesia.

"Dia juga pernah sekolah di Bali hingga SMP," ujar Jamaruli.

Saat dilakukan verifikasi, Sinclair dan Gerber bisa menjawab pertanyaan tentang kewarganegaraan dengan cukup baik. Selama di Indonesia, keduanya juga taat pajak dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal.

"Tim masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut dan menunggu kelengkapan dokumen keduanya," katanya. • han



LAYANAN DONOR PLASMA KONVALESEN
Sejumlah petugas ikut menyimak pengoperasian perdana unit perangkat Apherisis Haemonetics untuk mengambil plasma darah penyintas COVID-19 di UDD PMI Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (3/3). Penyediaan sarana apherisis donor plasma itu untuk memenuhi tingginya kebutuhan plasma darah bagi penderita COVID-19 yang mengalami keadanan medis di ruang-ruang perawatan isolasi rumah sakit di daerah itu maupun daerah lainnya.

Partai Berkarya: Anies Baswedan Tokoh yang Potensial Jadi Capres

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah tokoh yang potensial menjadi calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

Priyo mengatakan, Anies Baswedan adalah tokoh yang cukup bersinar pada generasi saat ini. Hal itu disampaikan Priyo menanggapi pertanyaan apakah Partai Berkarya akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres, dalam diskusi virtual, Rabu (3/3). "Saya melihat Anies Baswedan Gubernur DKI ini termasuk salah satu tokoh muda yang bersinar, tapi untuk Partai Berkarya masih terlalu pagi kalau bicara itu (pencalonan Capres)," ujar AR Priyo.

"Walau masih terlalu pagi, tapi boleh saya menilai jujur bahwa Anies Baswedan adalah tokoh pemimpin dari lapisan generasi sekarang yang bersinar, meski masih berderet (tokoh) yang ber-

sinar lainnya," kata Priyo. Selain Anies, Priyo mengatakan saat ini Partai Berkarya sedang melihat beberapa tokoh muda yang juga memiliki potensi untuk dicalonkan sebagai Capres.

"Lagi-lagi ini masih terlalu pagi, masih ada sederet tokoh lain yang kami masih hitung-hitung karena negeri ini bagus dan elok kalau yang memimpin terdiri dari raihan pemimpin dari berbagai warna," ucapnya.

Seperti diketahui dalam survei simulasi semi-terbuka, yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis 22 Februari, Anies Baswedan menempati peringkat ketiga berdasarkan jumlah elektabilitas dengan capaian 10,2 persen.

Anies Baswedan berada di bawah Prabowo di peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 22,5 persen dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 10,6 persen. • han

Jaksa Tangkap Terpidana Kasus Pembobol Dana Pensiun PT Pertamina Sebesar Rp1,4 T

JAKARTA (IM) - Kejaksaan menangkap terpidana kasus pembobol dana pensiun PT Taspem, Bety, yang disinyalir merugikan keuangan negara senilai Rp1,4 triliun. Bety ditangkap di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (2/3) malam, tanpa melakukan perlawanan.

"Terpidana Bety merupakan Komisaris Utama PT Sinergi Millennium Sekuritas (eks. PT Millenial Danatama Sekuritas) yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembobolan dana pensiun (Dapen) PT Pertamina," kata Kasipenkum Kejati DKI, Ashari Syam dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (3/3).

Ashari menyebut, terpidan Bety secara sah dan meyakinkan korupsi secara bersama-sama sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2496 K/Pid.Sus/2020 tertanggal 9 September 2020.

Dalam perkara ini, Bety melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta. Apabila tak kunjung dibayar, Bety wajib mengganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian, dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang senilai Rp 700 juta.

"Sehingga ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain pidana pokok, terpidana juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp777.331.421," paparnya.

Setelah ditangkap, Bety langsung dieksekusi ke Lapas Perempuan Kelas II A Pondok

Bambu Jakarta Timur.

Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Edward Seky Soeryadjaya -tersangka lain- yang merupakan direktur perusahaan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), Ortus Holding Ltd, berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubis pada pertengahan 2014.

Perkenalan itu berlanjut dengan kesepakatan bisnis berupa permintaan agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Akhirnya, Helmi pun melakukan pembelian saham SUGI senilai Rp601 miliar lewat PT Millenium Danatama Sekuritas.

Namun belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara dalam pembelian saham SUGI tersebut sebesar Rp599 miliar.

Atas temuan ini, Jampidsus Kejagung menetapkan Helmi sebagai tersangka. • han



PENEGGELAMAN KAPAL NELAYAN ASING
Petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Batam melakukan persiapan peneggelaman kapal nelayan asing di Perairan Pulau Air Raja, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/3). Sebanyak sepuluh kapal nelayan asing yang telah berkekuatan hukum tetap dan terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia ditenggelamkan oleh Kejaksaan Negeri Batam dan dilakukan selama dua hari.